



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya Yayasan XYZ dalam Menangani Kesenjangan
Pembangunan Manusia di Indonesia

Skripsi

Oleh

Sharon Zefanya Bleszynski

2015330161

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya Yayasan XYZ dalam Menangani Kesenjangan
Pembangunan Manusia di Indonesia

Skripsi

Oleh

Sharon Zefanya Bleszynski
2015330161

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Sharon Zefanya Bleszynski
Nomor Pokok : 2015330161
Judul : Upaya Yayasan XYZ dalam Menangani Kesenjangan
Pembangunan Manusia di Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 24 Juli 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP, M.A. : _____

Sekretaris

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D: _____

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sharon Zefanya Bleszynski
NPM : 2015330161
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya Yayasan XYZ dalam Menangani
Kesenjangan Pembangunan Manusia di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Agustus 2019

Sharon Zefanya Bleszynski

ABSTRAK

Nama : Sharon Zefanya Bleszynski
NPM : 2015330161
Judul : Upaya Yayasan XYZ dalam Menangani Kesenjangan
Pembangunan Manusia di Indonesia

Pembangunan manusia khususnya pada negara berkembang sering kali mengalami persoalan kesenjangan, banyak negara yang hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan tetapi tidak disertai dengan upaya pemerataan. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun manfaat peningkatan tersebut belum mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebab masih ditemui sejumlah kelompok yang termarginalisasi atau tereksklusi. Dalam usaha mengatasi persoalan ini, pemerintah Indonesia turut bekerja sama dengan berbagai aktor non-negara, salah satunya adalah Yayasan XYZ, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menjalankan program inklusi sosial di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini menjelaskan bagaimana Yayasan XYZ berupaya menangani kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia. Fungsi *non-governmental organizations* menurut Lewis dan Kanji serta konsep *interdependence* dari Keohane dan Nye digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Sebagai sebuah NGOs, Yayasan XYZ menjalankan fungsinya sebagai *catalyst*, *implementer*, dan *partner* yang ditunjukkan melalui program Peduli. Kegiatan program Peduli ini berfokus untuk meningkatkan akses layanan publik dan bantuan sosial; meningkatkan pemberdayaan dan penerimaan sosial; serta melakukan perbaikan dalam kebijakan terkait inklusi sosial. Melalui program Peduli, tergambarkan konsep *interdependence* yang terjadi di antara negara Indonesia dengan Yayasan XYZ. Indonesia membutuhkan Yayasan XYZ sebagai sebuah NGO, untuk membantu pemerintah dalam memenuhi sejumlah agenda negaranya. Sebaliknya, Yayasan XYZ membutuhkan kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menjalankan sejumlah kegiatannya dalam upaya mewujudkan tujuan inklusi sosial. Kontribusi Yayasan XYZ terhadap kesenjangan ditunjukkan melalui program Peduli yang memiliki tujuan mewujudkan inklusi sosial bagi masyarakat Indonesia. Tujuan inklusi sosial dari program Peduli menjawab persoalan kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia yang terjadi akibat pembangunan manusia yang belum menjangkau masyarakat yang tereksklusi.

Kata Kunci: Indonesia, Pembangunan Manusia, *Non-governmental Organizations*, Indeks Pembangunan Manusia, Kesenjangan, Inklusi Sosial

ABSTRACT

Name : Sharon Zefanya Bleszynski
Student Number : 2015330161
Title : *Efforts of the XYZ Foundation in Addressing Human Development Inequality in Indonesia*

Human development, especially in developing countries, often experience inequality problems, where many countries tend to focus only on increasing growth without accompanied by equity efforts. Indonesia's Human Development Index has increased year by year, but such increase has not seen to benefit all levels of society because there are still a number of groups that are marginalized or excluded. In an effort to overcome this problem, the Indonesian government also cooperates with various non-state actors, one of which is the XYZ Foundation, an international non-governmental organization that runs social inclusion programs in Indonesia. Therefore, this study explains how the XYZ Foundation seeks to address the inequality of human development in Indonesia. The function of non-governmental organizations according to Lewis and Kanji and the concept of interdependence from Keohane and Nye are used to answer the research problem formulation. As an NGO, the XYZ Foundation carries out its functions as a catalyst, implementer, and partner shown through the Peduli Program. Activities in this program focus on increasing access to public services and social assistance; improve social empowerment and acceptance; and make improvements in policies related to social inclusion. Through the Peduli Program, the concept of interdependence is illustrated between Indonesia and the XYZ Foundation. Indonesia needs the XYZ Foundation as an NGO, to assist the government in fulfilling a number of state agendas. While, the XYZ Foundation also requires collaboration with the Indonesian government to carry out a number of activities in an effort to achieve the ends of social inclusion. This social inclusion program from the XYZ Foundation addresses the problem of Indonesia's human development inequality issue that occurred from social exclusion.

Keywords: *Indonesia, Human Development, Non-governmental organizations, Human Development Index, Inequality, Social Inclusion*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Penelitian ini membahas bagaimana Yayasan XYZ, sebagai sebuah organisasi non-pemerintah internasional, berupaya menangani kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia. Pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan dan kesempatan hidup manusia, dengan turut memenuhi setiap hak dasar masyarakat. Namun, fokus terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia yang tanpa di sertai dengan pemerataan, telah menyebabkan banyak negara mengalami kesenjangan pembangunan manusia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berhadapan dengan persoalan ini berusaha mengatasinya dengan melibatkan bantuan dari aktor internasional, seperti Yayasan XYZ.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Yulius Purwadi Hermawan yang selalu memberikan masukan dan arahan, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Meski begitu, penulis juga menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna dan membutuhkan perbaikan. Maka, penulis sangat terbuka dan mengharapkan adanya kritik, saran/masukan yang bersifat membangun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab dengan baik dalam penelitian ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Deskripsi Masalah	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	8
1.2.3 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1 Metode Penelitian	20
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	21
1.7 Sistematika Pembahasan	22
BAB II - KESENJANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA ...	22
2.1 Pembangunan Manusia dan Kesenjangan	22
2.2 Kondisi Kesenjangan Pembangunan Manusia di Indonesia	25
2.2.1 Pendidikan	29
2.2.2 Kesehatan	36
2.2.3 Standar Hidup yang Layak	39

BAB III - YAYASAN XYZ SEBAGAI ORGANISASI NON-PEMERINTAH YANG BERKOMITMEN PADA PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA	42
3.1 Latar Belakang Yayasan XYZ	42
3.1.1 Perkembangan Yayasan XYZ.....	44
3.1.2 Pendanaan	47
3.2 Visi Misi	48
3.2.1 Visi Misi dan Nilai.....	48
3.2.2 Struktur Organisasi	51
3.3. Program Umum Yayasan XYZ	52
BAB IV - UPAYA YAYASAN XYZ DALAM MENANGANI KESENJANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA MELALUI PROGRAM PEDULI.....	58
4.1 Latar Belakang Program Peduli	59
4.2 Upaya Meningkatkan Inklusi Sosial	62
4.2.1 Peningkatan Akses Layanan Publik dan Bantuan Sosial.....	62
4.2.2 Peningkatan Pemberdayaan dan Penerimaan Sosial.....	75
4.2.3 Perbaikan dalam Kebijakan Terkait Inklusi Sosial.....	83
4.3 Analisis Upaya Yayasan XYZ dalam Perspektif Konsepsi Fungsi INGO dan Teori Liberalisme	89
BAB V - KESIMPULAN.....	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.....	25
Grafik 2.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan <i>Inequality-Adjusted Human Development Index</i> Indonesia.....	37
Grafik 2.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan 2014.....	38
Grafik 4.1 Keberhasilan <i>Outcome</i> 1 Berdasarkan Indikator.....	73
Grafik 4.2 Keberhasilan <i>Outcome</i> 2 Berdasarkan Indikator.....	82
Grafik 4.3 Keberhasilan <i>Outcome</i> 3 Berdasarkan Indikator.....	87

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi <i>Representative Country</i> Yayasan XYZ.....	57
Bagan 4.1 Hubungan <i>Interdependence</i> Indonesia dengan Yayasan.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.....	26
Tabel 2.2 Tingkat Kesenjangan Pendidikan Indonesia.....	30
Tabel 2.3 Presentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi.....	32
Tabel 2.4 Presentase Penduduk dan Partisipasi Sekolah 2017.....	33
Tabel 2.5 Angka Putus Sekolah 2017.....	34
Tabel 2.5 Tingkat Kesenjangan Kesehatan Indonesia.....	36
Tabel 2.6 Tingkat Kesenjangan Pendapatan Indonesia.....	41
Tabel 4.1 Peningkatan Akses Layanan Publik dan Bantuan Sosial.....	63
Tabel 4.2 Kegiatan dan Jumlah Penerima Manfaat <i>Outcome</i> 1.....	69
Tabel 4.3 Jumlah Penerima Manfaat <i>Outcome</i> 1 Berdasarkan Pillar.....	71
Tabel 4.4 Indikator Keberhasilan <i>Outcome</i> 1.....	73
Tabel 4.5 Peningkatan Pemberdayaan dan Penerimaan Sosial.....	76
Tabel 4.6 Jumlah Penerima Manfaat <i>Outcome</i> 2 Berdasarkan Pillar.....	79
Tabel 4.7 Indikator Keberhasilan <i>Outcome</i> 2.....	81
Tabel 4.8 Perbaikan dalam Kebijakan Terkait Inklusi Sosial.....	84
Tabel 4.9 Jumlah Penerima Manfaat <i>Outcome</i> 3 Berdasarkan Pillar.....	86
Tabel 4.10 Indikator Keberhasilan <i>Outcome</i> 3.....	87
Tabel 4.11 Pelaksanaan Fungsi NGOs Menurut Lewis dan Kanji.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Mitra Kerja Sama Program “Peduli”.....	105
Lampiran 2. Wilayah Cakupan Program “Peduli”.....	111
Lampiran 3. Daftar Hasil Perubahan Kebijakan di bawah Program “Peduli”...	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan manusia pada dasarnya adalah menyediakan kehidupan yang sepantasnya bahkan lebih baik lagi, tidak hanya sebatas kehidupan ekonomi namun juga secara keseluruhan hidup manusia. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), pembangunan manusia berbicara mengenai pengembangan individu ataupun kolektif dalam kesempatan maupun pilihan hidupnya.¹ Melalui pengembangan berarti menyediakan kesempatan bagi manusia untuk memperkaya potensi mereka dan menjalankan kehidupan yang menjadi pilihannya.

Elemen-elemen inti dari “paket” pembangunan manusia ditetapkan untuk pertama kalinya dalam *The Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.² Deklarasi tersebut mengakui hak sosial dan ekonomi seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, dan standar hidup yang layak, yang mana adalah hal-hal yang dijunjung dalam pembangunan manusia. Pembahasan mengenai pembangunan manusia ini tidak lepas dari keterkaitannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indeks Pembangunan Manusia sendiri menggunakan SDGs sebagai indikator perhitungannya. SDGs ini merupakan

¹ “About Human Development”, United Nations Development Programme, diakses pada 20 September 2018, <http://hdr.undp.org/en/humandev>

² *Ibid.*

sebuah agenda pembangunan global yang di pelopori oleh *United Nations* dengan komitmen meningkatkan kualitas kehidupan manusia, beberapa di antaranya seperti pengentasan kemiskinan, mendorong kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan.³ Dalam komitmennya, SDGs ini dijalankan dengan prinsip “*Leave No One Behind*”, yang berarti adanya kewajiban untuk melibatkan serta memberi manfaat baik bagi mereka yang miskin, menghadapi diskriminasi, baik dalam generasi sekarang maupun yang akan datang.⁴ Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia, keduanya memiliki gagasan bahwa setiap kehidupan manusia memiliki nilai dan setiap diantaranya sama berharganya.

Sejak 1990, pendekatan pembangunan manusia telah menjadi salah satu kerangka hingga saat ini untuk memajukan pengukuran perkembangan negara, khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang digunakan secara universal sebagai ukuran dari perkembangan pembangunan manusia.⁵ Dengan konsensus umum, Indeks Pembangunan Manusia ini digunakan sebagai indikator penting untuk menunjukkan pencapaian rata-rata suatu negara dan mengukur keberhasilannya dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dari dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.⁶ Indeks ini yang kemudian dirangkum secara berkala oleh UNDP dan dipublikasikan dalam sebuah *Human Development Report*.

³ “About the Sustainable Development Goals”, *United Nations*, diakses pada 20 September 2018, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

⁴ *Ibid.*

⁵ Human Development Report 2016, *United Nations Development Programme*

⁶ *Ibid.*

Namun pembangunan manusia khususnya pada negara berkembang sering kali mengalami persoalan. Analisis terhadap *Human Development Report* menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi tidak menentu manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.⁷ Hal ini menunjukkan program pembangunan manusia yang dijalankan oleh negara belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, masih terdapat sejumlah masyarakat yang termarginalisasi dari pembangunan manusia. Marginalisasi atau eksklusi sosial merupakan suatu kondisi ketika individu atau kelompok dalam masyarakat tidak sepenuhnya memiliki akses sosial maupun politik. Akibatnya, kelompok masyarakat yang tereksklusi hidup dalam keterbatasan partisipasi dan sumber daya.⁸ Tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia memang penting dan menjadi usaha setiap negara. Namun peningkatan semata-mata bukan tujuan dasar dari pembangunan, yang menjadi latar belakang pembangunan manusia adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi setiap manusia tanpa terkecuali.

Persoalan kesenjangan ini yang turut dirasakan oleh Indonesia. Walaupun dalam satu dekade, jumlah penduduk miskin terus menunjukkan penurunan, namun masih terdapat beberapa kelompok miskin dan termarjinal yang belum tersentuh oleh program pembangunan atau mendapatkan layanan dasar.⁹ Kebutuhan untuk mendorong inklusi sosial menjadi suatu kebutuhan Indonesia untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan dan termarjinal. Salah satu upaya

⁷ Christophe Bahuet dan Juliaty Ansyé Sopacua, "SDGs in Indonesia: 2018 and beyond", *The Jakarta Post*, diakses pada 20 September 2018, <http://www.thejakartapost.com/news/2018/03/19/sdgs-indonesia-2018-and-beyond.html>

⁸ *Ibid.*

⁹ "Pembangunan Manusia Inklusif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat", *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia*

pemerintah diwujudkan dalam visi *nawacita* yang dimiliki oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara, mengedepankan peran pemerintah dalam pelayanan tanpa membedakan seseorang berdasarkan suku, agama, maupun ras, serta mempertahankan kebhinekaan sebagai kekayaan sebuah bangsa.

Dengan menjadi sebuah isu yang menyinggung kesejahteraan masyarakat, maka dari itu pembangunan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab yang diusahakan oleh negara tetapi juga menjadi isu yang diperjuangkan oleh aktor internasional lainnya, terutama ketika negara dianggap kesulitan atau bahkan tidak mampu menggapainya. Di sini peran aktor lain dirasa sangat dibutuhkan, tidak hanya guna mencapai kesejahteraan umat manusia secara negara tetapi tentu juga secara global. Keberadaan *development assistance* ini tidak hanya muncul dari negara lain secara bilateral namun juga dari organisasi internasional dan lembaga pembangunan internasional. Dalam rangka merealisasikan tujuan negara untuk turut mencapai pembangunan nasional yang berfokus pada *human development*, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima bantuan maupun bimbingan internasional dari berbagai macam aktor non-negara, khususnya dalam isu pembangunan di antaranya *Non-Governmental Organizations*.

Salah satu organisasi internasional yang menjalankan sejumlah program pembangunan di Indonesia adalah Yayasan XYZ. Sebagai sebuah *International Non-Governmental Organization*, Yayasan XYZ melalui berbagai programnya mendukung kepemimpinan, memperbaiki kebijakan, dan memperkuat berbagai

usaha dalam mewujudkan keterbukaan dan kesejahteraan, serta berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di kawasan Asia. Khususnya di Indonesia, Yayasan XYZ menjalankan visi misinya yang selaras dengan agenda pembangunan negara. Dengan kehadiran Yayasan XYZ dan berbagai bentuk kegiatannya di Indonesia yang berorientasi pada pembangunan, maka penulis mengambil judul: **Upaya Yayasan XYZ dalam Menangani Kesenjangan Pembangunan Manusia di Indonesia**

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menurut UNDP pada tahun 2013 adalah 0.684, dari skor tertinggi yaitu 1 dan terendah yaitu 0.¹⁰ Ukuran ini ditarik berdasarkan beberapa indikator IPM, yaitu angka harapan hidup sebesar 70,8 tahun, rata-rata lama sekolah yaitu 7,5 tahun, angka harapan lama sekolah 12,7 tahun, dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebesar 8,970 Dolar AS.¹¹ Pada tahun 2017, nilai IPM Indonesia mencapai angka 0,694. IPM ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, yaitu peringkat 116 dari 188 negara. Meski belum masuk dalam kategori pembangunan manusia tinggi, peringkat ini merupakan pertanda baik

¹⁰ “Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Meningkat tapi Kesenjangan Masih Tetap Ada”, *United Nations Development Programme*, 22 Maret 2017

¹¹ Human Development Report 2014, *United Nations Development Programme*

melihat dari naiknya nilai IPM Indonesia sebesar 31,4 persen selama 27 tahun terakhir (1990-2017), berdasarkan data dari UNDP.¹²

Namun pada kenyataannya, angka IPM yang tinggi ini sayangnya belum dirasakan oleh sejumlah kelompok masyarakat di Indonesia. Tidak meratanya pembangunan manusia ini membuat Indonesia masih berada dalam kesenjangan. Di Indonesia, meskipun terjadi penurunan kemiskinan secara tajam dalam dua dekade terakhir, nyatanya 140 juta warga (53 persen dari total populasi) masih hidup setiap harinya dengan kurang dari upah rata-rata nasional, yaitu Rp. 20.000 per hari.¹³ Didukung oleh laporan UNDP tahun 2016 perihal *Inequality-Adjusted Human Development Index*, angka IPM Indonesia pada tahun 2015 ternyata menurun tajam ke 0,563 atau berkurang sebesar 18,2 persen bila faktor kesenjangan diperhitungkan. Penyumbang ketimpangan pembangunan manusia ini di antaranya adalah pendapatan yang tidak merata, kesenjangan pendidikan, kondisi kesehatan masyarakat, dan di antaranya adalah ketidaksetaraan gender. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh UNDP dalam laporan pembangunan manusia tahun 2016 justru menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 105 untuk *gender inequality index*.¹⁴

IPM Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa setelah begitu banyak kemajuan yang dicapai, langkah selanjutnya menuju pembangunan manusia yang tinggi adalah inklusi dan pengurangan kesenjangan. Sejak terpilihnya Presiden

¹² Human Development Report 2016, *United Nations Development Programme*

¹³ Yuliyanna Fauzi, "Ranking Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Turun ke-113", *CNN*, 22 Maret 2017, diakses pada 25 September 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113>

¹⁴ Human Development Report 2016, *United Nations Development Programme*

Joko Widodo pada tahun 2014, administrasinya menetapkan sembilan prioritas pembangunan atau “Nawa Cita”, di mana termasuk di dalamnya upaya peningkatan kualitas hidup manusia serta menjangkau pemenuhan hak seluruh masyarakat Indonesia.¹⁵ Dalam usaha memenuhi rencana kerja tersebut, pemerintah pun turut bekerja sama dengan agen non-pemerintah, salah satu di antaranya adalah Yayasan XYZ. Sejak tahun 2014, Pemerintah Indonesia memprakarsai sebuah program pembangunan yang bermitra dengan Yayasan XYZ, dengan bantuan dana dari Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.¹⁶ Sebelumnya program ini difasilitasi oleh Bank Dunia sejak 2011 hingga 2014. Pada tahun 2014, Bank Dunia menyerahkan tanggung jawab program yang berorientasi *human development* ini, untuk di ambil alih oleh Yayasan XYZ. Bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK), program berbasis *human development* dari Yayasan XYZ ini diinisiasi untuk berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan pada perempuan, anak-anak, dan kelompok-kelompok terpinggirkan dengan memenuhi kebutuhan akan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan restorasi sosial.¹⁷

¹⁵ “Menuju Perencana Profesional Sumpul Perencana: Nawa Cita”, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Bappenas, April 2017, <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/file/bukuterbit/SIMPUL%20Vol.%2029%20April%2017.pdf>

¹⁶ “Development Assistance in Indonesia”, *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*, <https://dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/inclusive-society-in-indonesia.aspx>

¹⁷ *Ibid.*

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana Yayasan XYZ berupaya mengatasi kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia melalui Program Peduli. Adapun pembatasan kurun waktu yang dilakukan yaitu empat tahun berjalannya program berbasis *human development* tersebut di Indonesia. Penulis akan berfokus pada fase II Program Peduli, yaitu sejak tahun 2014 (ketika World Bank menyerahkan tanggung jawab program Peduli kepada Yayasan XYZ) hingga tahun 2018.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan deskripsi masalah yang sudah dijelaskan oleh penulis pada sub-bab sebelumnya, maka muncullah pertanyaan penelitian (*research question*): **“Bagaimana Yayasan XYZ berupaya menangani kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan bagaimana dalam kondisi tidak meratanya pembangunan manusia yang dialami oleh Indonesia, Yayasan XYZ dapat berkontribusi menangani kesenjangan tersebut melalui program kerja yang dirancangnya. Penelitian ini akan dibantu dengan menggunakan data-data dan teori-teori Hubungan Internasional yang relevan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan pembaca dengan memahami permasalahan kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia dan bagaimana *International Non-governmental Organizations* berperan dalam persoalan tersebut. Kemudian dengan ditulisnya penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta sumber referensi dalam pengembangan penelitian serupa. Adapun kegunaan penelitian bagi penulis sendiri adalah untuk memahami lebih dalam tentang masalah yang diangkat.

1.4 Kajian Literatur

Seiring dengan meningkatnya peran *International Non-Governmental Organizations* sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan di negara berkembang, semakin meningkat pula ukuran dan kompleksitas operasionalnya. Maka dari itu, muncullah kebutuhan yang lebih besar bagi INGOs untuk menerapkan manajemen strategis yang lebih efektif. Melalui artikel *Strategic Management of NGOs in Developing Countries* dalam *The Journal of Nonprofit Education and Leadership*, dijelaskan bagaimana aktor non-pemerintah dan *non-profit* memberikan layanan kepada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, dan apa saja komponen NGOs yang terkait dalam menjalankan kinerjanya di negara-negara berkembang tersebut.¹⁸ Beberapa poin utama dalam jurnal ini dapat

¹⁸ Niaz Murtaza, and Michael J. Austin, "Strategic Management of NGOs in Developing Countries," *The Journal of Nonprofit Education and Leadership* 2, no. 1 (2011).

dibagi menjadi: *Relationships with donor, relationship with government, NGOs Coordination, NGOs Accountability, Strategic impact of NGOs.*

Dalam strategi hubungan eksternal, salah satu di antaranya adalah komponen *Relationships with donors*, yang berbicara mengenai kecenderungan pengaruh donatur terhadap kebijakan dan program dalam NGOs; dan sejauh mana NGOs mampu mempengaruhi donor demi memenuhi programnya.¹⁹ Artikel dalam *The Journal of Nonprofit Education and Leadership* tersebut menyinggung hubungan antara NGOs dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana keterkaitan tersebut didasari oleh sebagian besar visi dan misi NGOs yang sejalan dengan agenda PBB. Salah satu agenda PBB di antaranya adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana NGOs ini semakin terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Di samping PBB, NGOs juga seringkali menjalin kerjasama dengan *global economic institutions* seperti World Trade Organization dan World Bank. Penulis dalam artikel ini menjelaskan bahwa *global economic institutions* membangun kemitraan dengan NGOs dalam upaya penerapan praktik pembangunan yang lebih strategis. Komponen hubungan eksternal lainnya adalah *Relationships with governments* yang menjelaskan bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap NGOs; bagaimana sifat kolaborasi di antara keduanya; dan kemampuan NGOs untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di negara berkembang. Dalam bagian ini juga dipaparkan bagaimana kolaborasi di antara pemerintah dan NGOs semakin berkembang dalam berbagai bidang pembangunan di negara-negara berkembang.

¹⁹ *Ibid.*

Selain hubungan eksternal, komponen *NGOs Coordination* memberikan pembahasan terkait upaya NGOs dalam melakukan koordinasi baik secara nasional maupun internasional, dan bagaimana koordinasi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan dan pencapaian program. Berikutnya, komponen *NGOs Accountability* berbicara mengenai kecenderungan NGOs menggunakan sejumlah mekanisme untuk mencapai *practical accountability*. Dalam pembahasannya dikatakan apabila NGOs ingin mencapai misinya, maka perlu ada bentuk akuntabilitas yang diarahkan secara mendasar untuk mengembangkan struktur sosial, ekonomi, dan politik di negara berkembang. Dan kemudian komponen *Strategic impact of NGOs*, memaparkan dampak yang mampu diberikan oleh NGOs dalam pengimplementasian berbagai program pembangunan di negara-negara berkembang. Dalam penelitian ini, artikel di atas menjadi relevan dalam pembahasan upaya NGOs dalam merencanakan programnya di negara berkembang, dalam konteks ini Indonesia. Kelima komponen tersebut akan menjelaskan bagaimana program pembangunan manusia dapat dijalankan oleh Yayasan XYZ.

Dalam konteks pembangunan manusia, salah satu aspek penting di dalamnya adalah pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Melalui penelitian *The Role of Non-Governmental Organisations in the Improvement of Livelihood in Nepal* karya Tekh Dhakal, dipaparkan upaya INGOs dalam mengkaji isu-isu kemiskinan dan mengeksplorasi bagaimana sumber daya INGOs tersebut dapat diterapkan dalam pengembangan masyarakat di negara berkembang, dalam

konteks ini negara Nepal.²⁰ Dalam pembahasannya, Tekh Dhakal menghubungkan peran dan fungsi INGOs dengan proses pengentasan kemiskinan, pemerolehan status hukum, dan berbagai masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat yang tidak menerima manfaat dari kebijakan pemerintah. Melalui penelitian tersebut, ditunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh INGOs, salah satunya melalui penciptaan maupun peningkatan *awareness* di negara berkembang, terbukti memiliki dampak yang lebih positif dalam upaya pengembangan masyarakat dibandingkan *income-generating activities*. Dalam asumsinya, program yang berorientasi pada *income-generating* ini justru seringkali menimbulkan ketergantungan masyarakat pada INGOs. Dalam pembahasannya, INGOs bertindak sebagai agen perubahan pada tingkat *grassroots*, yaitu adanya partisipasi konkrit dari masyarakat, dan secara efektif meningkatkan hak dan peran bagi kelompok masyarakat. Di samping itu, INGOs sebagai mitra pembangunan pemerintah seringkali belum dianggap sebagai salah satu aktor dalam kebijakan negara-negara berkembang, karena belum ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk menginisiasikan pembangunan lewat INGOs. Secara singkat, kekurangan kebijakan di beberapa negara berkembang adalah: kurangnya arah yang jelas mengenai fungsi INGOs; tidak adanya kesinambungan dengan rencana dan program pemerintah; dan kurangnya koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan INGOs.

Literatur di atas menunjukkan kurangnya keselarasan antara INGOs yang berkegiatan di negara berkembang dengan pemerintah di negara itu sendiri.

²⁰ Tekh Nath Dhakal, "The Role of Non-Governmental Organisations in the Improvement of Livelihood in Nepal" (Academic diss., University of Tampere, 2002)

Namun, nampaknya jika ditarik dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut cukup berbeda. Maka, penelitian ini berkontribusi untuk menjelaskan bagaimana tindakan (program) INGOs dapat dilakukan dalam konteks yang lebih kooperatif--adanya hubungan kemitraan antara Yayasan XYZ dengan pemerintah Indonesia.

Dalam lima belas tahun terakhir, sektor pembangunan global diwarnai dengan adanya pendekatan berbasis hak atau yang sering disebut sebagai *the rights-based approach*.²¹ Kehadiran pendekatan ini mengakibatkan donor pembangunan bilateral, organisasi internasional, dan organisasi internasional non-pemerintah (INGOs) yang berorientasi pada pembangunan, semakin berkomitmen secara teori untuk menerapkan hak asasi manusia. Melalui artikel dalam jurnal *Human Rights Quarterly* tersebut, dipaparkan bagaimana pendekatan berbasis hak tersebut berdampak pada struktur, sumber daya, dan proses kerja suatu organisasi non-pemerintah yang berbasis pembangunan. Adapun di antaranya empat asumsi terkait kehadiran *rights-based approach* dalam INGOs. *Pertama*, kemitraan pembangunan akan semakin terbangun dan berkembang, karena baik donor maupun INGOs akan saling mencari mitra yang turut berbasis hak dan bekerja sama dengan aktor-aktor pembangunan lainnya. *Kedua*, INGOs dari semua jenis akan semakin menekankan pentingnya upaya advokasi dalam program dan proyek. *Ketiga*, INGOs yang beroperasi di *higher tiers* SDGs cenderung menggunakan retorika hak universalis dalam pernyataan misi, justifikasi program, dan advokasi publik.²² *Keempat*, *rights-based approach* ini akan meningkatkan

²¹ Kindornay, Shannon, James Ron, and Charli Carpenter, "Rights-Based Approaches to Development: Implications for NGOs," *Human Rights Quarterly* 34, no. 2 (05, 2012)

²² *Ibid.*

akuntabilitas INGOs dan mengurangi ketimpangan kekuatan antara aktor-aktor dalam pembangunan global.

Literatur di atas mendukung argumen penelitian ini, dengan melihat bagaimana penerapan aspek-aspek Hak Asasi Manusia seperti *rights-based approach* mempengaruhi kinerja dan implementasi program INGOs. Secara spesifik penelitian ini akan membahas aplikasi *rights-based approach* terhadap upaya pembangunan manusia yang dilakukan oleh Yayasan XYZ di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, terjadi perkembangan dalam struktur politik internasional dengan munculnya perhatian pada aktor-aktor selain negara.²³ Kehadiran perusahaan multinasional dan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, menjadi bukti bahwa negara bukan lagi satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Salah satu teori dalam Hubungan Internasional yang mengkaji fenomena tersebut adalah Liberalisme. Teori liberalisme memandang adanya keberagaman aktor dalam hubungan internasional yang membentuk *world politics*, sebuah dunia atau masyarakat global yang terdiri aktor negara dan non-negara.²⁴

Liberalisme memiliki beberapa asumsi.²⁵ *Pertama*, baik negara maupun aktor non-negara memiliki peran penting dalam politik internasional. Hal ini

²³ Henry F. Carey, *Mitigating Conflict: The Role of NGOs*, (London: Frank Cass Publishers, 2003), 1.

²⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "World Images", in *International Relations and World Politics*, Fifth ed. (Pearson, 2013), 33.

²⁵ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "Liberalism: Interdependence and Global Governance", in *International Relations Theory*, Fifth ed. (Pearson, 2012), 129.

dikarenakan *world politics* terdiri dari *multiple actors* seperti di antaranya organisasi internasional, baik dalam cakupan pemerintah maupun non-pemerintah, perusahaan multinasional, hingga kelompok dan individu. *Kedua*, cakupan agenda politik internasional tidak lagi hanya terpaku pada isu militer dan ketahanan negara, namun meluas khususnya pada isu sosial, ekonomi, hingga lingkungan. *Ketiga*, aktor non-negara seperti organisasi pemerintah dan non-pemerintah memiliki peran utama dalam membangun integrasi regional. *Keempat*, dengan meningkatnya globalisasi, hubungan antara aktor negara dengan non-negara akan semakin meningkat.

Berdasarkan asumsi liberalisme, Keohane dan Nye melihat adanya konsep *interdependence* yang berfokus pada jaringan yang terbentuk antara negara dan aktor lainnya dalam politik internasional.²⁶ *Interdependence* ini menjelaskan bahwa negara dan aktor non-negara internasional menjadi saling bergantung atau bahkan dipengaruhi oleh tindakan aktor lainnya akibat hubungan resiprokal antar aktor internasional.²⁷ Saling ketergantungan ini memaksa negara dan aktor internasional lainnya untuk bekerja sama lebih luas dalam bidang dan isu lainnya, ditambah dengan kondisi beberapa negara tertentu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan yang kompleks dan beragam tanpa adanya kerja sama dengan aktor internasional. Entitas atau aktor non-negara yang dimaksud dalam konsep ini mencakup di antaranya organisasi internasional pemerintah dan non-pemerintah, perusahaan multinasional, hingga kelompok dan individu.

²⁶ *Ibid*, 144

²⁷ *Ibid*.

Clive Archer mengklasifikasi jenis organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya, yaitu *International Governmental Organizations* (IGOs) dan *International Non-governmental Organizations* (INGOs).²⁸ IGOs disebut sebagai organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian dengan wakil-wakil pemerintah sebagai anggota. Sementara INGOs adalah organisasi internasional yang keanggotaannya bukan mewakili pemerintah.²⁹

Untuk memahami konsep *International Non-governmental Organizations* berdasarkan latar belakangnya, The World Bank mendefinisikan INGOs sebagai organisasi swasta internasional yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengangkat kepentingan masyarakat miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan sosial mendasar, atau melakukan pengembangan manusia.³⁰ NGOs pada dasarnya mengupayakan kepentingan masyarakat yang belum mampu terselesaikan oleh suatu negara. Dengan bergerak memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan, NGOs memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan organisasi internasional lain, yaitu NGOs bersifat formal, privat, non-profit, sukarela, non-religi, dan non-politik.³¹

Dalam mencapai tujuannya, INGOs turut melakukan berbagai kegiatan yang merujuk pada sejumlah peran atau fungsi. Maka, dalam menganalisis upaya NGOs perlu adanya pemahaman terlebih dahulu mengenai fungsinya. Selain karakteristik diatas, Lewis dan Kanji mengkategorikan fungsi NGOs meliputi (1)

²⁸ Clive Archer, *International Organization, 3rd Edition*, (London: Routledge, 2001), 33

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Carmen Malena, *Working with NGOs: A Practical Guide to Operational Collaboration Between the World Bank and Non-governmental Organization*, (1995), 13

³¹ David Lewis dan Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development Title of Book*, (New York: Routledge, 2009), 92-112

Implementer, (2) *Catalyst*, dan (3) *Partnership*.³² Sebagai (1) *Implementer*, NGOs berfungsi memobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi ini sering disebut sebagai *service delivery* karena NGOs tersebut memobilisasi berbagai sumber daya seperti layanan kesehatan, agrikultur, bantuan sosial dan bencana, hingga hak asasi manusia. Implementasi fungsi *service delivery* menjadi penting terutama pada negara-negara berkembang yang berhadapan dengan isu distribusi layanan dasar kepada masyarakatnya. *Service delivery* ini tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan primer kepada masyarakat yang hidup dalam kekurangan, tetapi dapat juga berupa sumber daya lainnya yang lebih luas, seperti layanan publik yang berkualitas. Konsep (2) *Catalyst* biasanya dimengerti sebagai seseorang atau sesuatu yang dapat membawa perubahan. Fungsi *catalyst* dijalankan oleh NGOs dengan melakukan advokasi dan menjadi *watchdog* terhadap pemerintah. Fungsi ini menjadi bagian dari NGOs karena mereka dianggap memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memfasilitasi, atau berkontribusi dalam mempengaruhi pemikiran atau aksi dalam mempromosikan dan menggerakkan perubahan. Sementara, *watchdog* menggambarkan fungsi NGOs sebagai pemantau tindakan dan kebijakan pemerintah, memastikan pemerintah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya memenuhi hak masyarakat. Fungsi (3) *Partnership* sebuah NGOs berkaitan dengan kerja sama yang dijalankannya dengan aktor lain seperti pemerintah, donor, ataupun sektor privat. Kemitraan umumnya merujuk pada hubungan yang di sepakati antara dua atau lebih lembaga dalam suatu proyek atau

³² *Ibid.*, Hal 12-13

program. Kerja sama ini menjadi penting dalam efisiensi penggunaan sumber daya serta mengembangkan dan memperkuat kapabilitas suatu NGOs dalam pencapaian tujuannya.

Keterlibatan organisasi internasional (pemerintah maupun non-pemerintah) tidak lepas dari upaya menciptakan kondisi yang lebih baik bagi suatu negara dan masyarakatnya, sehingga target utama pengembangan umumnya adalah manusia atau *human development*. Dalam melaksanakan kegiatannya yang berorientasi masyarakat, organisasi internasional secara universal melandaskan kinerjanya pada Hak Asasi Manusia. Berdasarkan *United Nations Declaration on the Right to Development* pada tahun 1986, setiap orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat sepenuhnya diwujudkan.³³

United Nations Development Programme (UNDP) dalam *Human Development Report* (HDR), merumuskan konsep pembangunan manusia sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut.³⁴ Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan; sekaligus sebagai

³³ “Development is a Human Right”, Right to Development, United Nations Human Rights Office of High Commissioner, diakses pada 12 September 2018, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/Introduction.aspx>

³⁴ “What is Human Development”, About Human Development, United Nations Development Programme, diakses pada 12 September 2018, <http://hdr.undp.org/en/humandev>

pemanfaatan kemampuan dan keterampilan mereka. Menurut UNDP, konsep pembangunan manusia di atas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan pembangunan ekonomi yang hanya menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pengembangan sumber daya manusia.³⁵

Penelitian Mahbub Ul Haq yang dikontribusikan dalam *Human Development Report* menyebutkan bahwa untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, konsep pembangunan manusia harus dibangun dari empat dimensi yang tidak terpisahkan. Berdasarkan konsep di atas maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat unsur pokok yang perlu diperhatikan.³⁶

Pertama, Produktivitas (*Productivity*); Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia. *Kedua*, Pemerataan (*Equity*); Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang yang ada. *Ketiga*, Kestinambungan (*Sustainability*); Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua jenis permodalan baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Mahbub Ul Haq, *Reflections on Human Development*, (New York: Oxford University Press, 1995),

dilengkapi. *Keempat*, Pemberdayaan (*Empowerment*); Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

Melalui konsep pembangunan manusia tersebut, *Human Development Index* (HDI) kemudian digunakan oleh UNDP sebagai indeks komposit tunggal untuk mengukur pembangunan manusia dalam suatu negara. Menurut UNDP, *Human Development Index* digunakan sebagai standar dunia internasional dalam menghitung kualitas pembangunan manusia di suatu negara dengan beberapa klasifikasi. Indeks tersebut secara garis besar menggambarkan dimensi pokok pembangunan manusia yang dicerminkan dalam status kemampuan dasar penduduk (*basic capabilities*).³⁷ Indeks Pembangunan Manusia ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yang dijadikan indikator pengukuran, di antaranya (1) Kesehatan, (2) Pendidikan, dan (3) Ekonomi.³⁸

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam menuliskan sebuah penelitian, diperlukan sebuah metode penulisan agar data yang diperoleh dapat diolah dan tersusun dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian data kualitatif. Penelitian

³⁷ “Human Development Index”, United Nations Development Programme, diakses pada 12 September 2018, <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>

³⁸ “Indeks Pembangunan Manusia”, Badan Pusat Statistik, diakses pada 12 September 2018, <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>

kualitatif sendiri bersifat deskriptif, dimana data-data yang telah dikumpulkan disusun dengan tujuan agar penelitian tersebut menjadi objektif dan sistematis.³⁹

Metode penelitian deskriptif ini dipilih untuk menggambar dan memaparkan secara jelas mengenai situasi dan kejadian yang ada berdasarkan data, fakta, dan dokumen yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan pendekatan *case study research*, dimana dalam *case study research*, data dan teori yang digunakan merupakan hasil pengumpulan dari berbagai sumber. Selanjutnya, teori dan data yang dipaparkan kemudian akan digunakan untuk mendukung penelitian.⁴⁰

Penelitian kualitatif sendiri bersifat umum dan luas, yang kemudian dipersempit saat pengumpulan data. Peran penelitian kualitatif adalah sebagai pengamat data-data yang selanjutnya diinterpretasikan. Maka dari itu, metode kualitatif ini sangat bertumpu pada *input* data dan informasi-informasi yang ada sehingga perolehan data yang ada kemudian dianalisis menjadi data yang lebih spesifik dan diringkas mudah dipahami dan dimengerti.⁴¹

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat empat jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi, bahan-bahan audio visual, dan studi dokumen.⁴² Dalam penelitian ini studi dokumen/pustaka merupakan satu-satunya yang dipilih, dengan pengambilan data primer dari organisasi yang bersangkutan dan

³⁹ John W. Creswell, "Qualitative Inquiry & Research Design," (London: Sage Publication, 2007), 37.

⁴⁰ *Ibid.*, 73

⁴¹ *Ibid.*, 36

⁴² *Ibid.*, 179-180.

pengambilan data sekunder akan berasal dari berbagai sumber yang terverifikasi dan valid, seperti buku, jurnal, *official report*, artikel, dan berita.

Penulis menggunakan data laporan program dan profil mengenai Yayasan XYZ yang berasal dari sumber primer. Selain itu, juga digunakan data-data dan berbagai sumber yang membahas mengenai teori-teori Hubungan Internasional, indeks pembangunan manusia, INGOs, pembangunan manusia dan Indonesia, yang berasal dari berbagai situs terpercaya. Untuk mendapatkan data yang terverifikasi, penulis juga menggunakan *e-databases* seperti Proquest, SAGE, Google Scholar, SPRINGER, dan Jstor. Selain itu, digunakan juga sumber dari media-media yang terpercaya seperti CNN, Tempo, Kompas, The Jakarta Post, dan VOA Indonesia.

1.7 Sistematika Pembahasan

Tulisan ini dimulai dengan **Bab I** yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Pada **Bab II**, dijelaskan mengenai kondisi kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia. Selanjutnya, **Bab III** akan memaparkan profil tentang Yayasan XYZ sebagai organisasi non-pemerintah yang beroperasi di Indonesia. **Bab IV** akan menjelaskan bagaimana Yayasan XYZ sebagai sebuah INGOs melakukan upaya pembangunan manusia di Indonesia melalui program Inklusi Sosial. Pada **Bab V**, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan.